

# **PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN INDEKS GINI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI INDONESIA**

*Wanda Erwina*

*Rudy Badrudin*

*E-mail: wandaerwina@gmail.com*

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of regional financial performance on public welfare consisting of the index of human development, unemployment, and income inequality through economic growth as an intervening variable and audit opinion as a moderating variable. The study was conducted in 34 provinces in Indonesia during the 2016-2018 observation period using 102 purposive sampling methods. Hypothesis testing was using the Structural Equation Model from WarpPLS. The results showed that regional financial performance had a positive effect on economic growth, human development index, open unemployment rate, and income inequality. Audit opinions do not moderate the relationship between regional financial performance and economic growth. Economic growth has a negative effect on the human development index and the level of open unemployment, but has a positive effect on income inequality. Audit opinions cannot interfere with the relationship between regional financial performance with the human development index, open unemployment rates, and income inequality.

**Keywords:** regional financial performance, economic growth, audit opinion, human development index, unemployment, gini index

**JEL classification:** O15, O47

## **PENDAHULUAN**

Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemda untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelayanan publik di daerah dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemda dapat dihitung menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio keserasian belanja langsung. Informasi yang didapatkan dari analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berguna untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemda berhasil mengelola keuangannya dengan baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah diharuskan menyiapkan laporan keuangan dalam bentuk realisasi APBD yang diaudit oleh BPK. Pendapat audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan kualitas pemerintahan.

Penelitian sebelumnya mengenai KKD terhadap PE (Nurulita, Arifulsyah, & Yefni, 2018) menunjukkan bahwa RKM dan REFEEK tidak berpengaruh signifikan terhadap PE sedangkan REFI berpengaruh signifikan terhadap PE di Provinsi Riau. Penelitian (Syamsudin, Cahya, & Dewi, 2015) menunjukkan bahwa RKM berpengaruh signifikan terhadap PE sedangkan REFEEK dan REFI tidak berpengaruh terhadap PE. Penelitian (Harliyani & Haryadi, 2016) menunjukkan bahwa RDF dan RKBL berpengaruh terhadap IPM sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Berdasar penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan di kabupaten/kota dengan perhitungan terpisah di setiap rasio dan memiliki hasil yang tidak konsisten maka peneliti ingin meneliti variabel kinerja keuangan dengan menggunakan RDF, RKM, REFEEK, REFI dan RKBL sebagai indikatornya.

#### MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori keagenan, teori desentralisasi fiskal, teori kinerja keuangan daerah, opini laporan keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks gini. *Agency theory* merupakan hubungan antara *principal* dengan *agent* yang melakukan kerjasama dalam membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Desentralisasi Fiskal menggambarkan kemampuan pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus memperhatikan prinsip *money should follow function* dalam pelaksanaannya, artinya terdapat anggaran pada setiap pelimpahan wewenang pemerintahan (Badrudin, 2017:41).

Kinerja adalah penggambaran dari pencapaian program dalam mewujudkan visi dan misi yang ada dalam perencanaan strategik suatu organisasi (Mahsun, 2012:25). Kinerja keuangan daerah adalah hasil evaluasi dari program yang digunakan sebagai ukuran untuk melihat kemampuan pemda dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut UU No.15 tahun 2004, opini audit adalah pernyataan profesional yang diberikan auditor tentang kewajaran informasi yang ada dalam laporan keuangan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang

yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek Produk Domestik Bruto (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan dalam jangka panjang akan menunjukkan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh proses internal perekonomian (*self generating*) (Fadli, 2017) *which increased from year to year, is also accompanied by an increase in revenue (PAD).*

IPM merupakan tolok ukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah atau daerah yang diukur dari tingkat kesehatan yang diukur dari tingkat kelahiran, pendidikan yang dilihat dari angka harapan lama sekolah, dan pendapatan yang dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut BPS, TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terjadi karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur. Menurut BPS, Indeks Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah atau daerah yang nilainya berada antara 0 (nol) yang artinya pemerataan pendapatan sempurna hingga satu 1 yang memiliki arti ketimpangan pendapatan sempurna.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dengan membandingkan analisis rasio kinerjanya menggunakan data laporan realisasi anggaran yang hasilnya berbeda pada setiap daerah, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. PE merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan nasional. Tercapainya PE yang inklusif tidak terlepas dari kinerja keuangan daerah yang baik. Penelitian Arsa & Setiawina, (2015), Nurulita *et al.*, (2018), Syamsudin *et al.*, (2015), Ani & Dwirandra (2014) menunjukkan bahawa rasio KKD yang berupa RKM, REFEEK, dan REFI berpengaruh positif signifikan terhadap PE. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

IPM merupakan tolok ukur pembangunan suatu negara yang paling tepat karena memperhitungkan angka harapan hidup dan angka harapan lama sekolah. Evaluasi atas kinerja keuangan di antaranya dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran dan

kemudian membandingkannya dengan data APBD melalui analisis rasio yang akan menggambarkan bagaimana pemda mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik penilaian kinerja keuangan suatu daerah menandakan baiknya kinerja pemerintahan daerah sebagai *agent*. Jika kinerja *agent* semakin baik, maka pemerintahan daerah akan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat sebagai *principal* yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Penelitian sebelumnya Harliyani & Haryadi (2016), Suryaningsih *et al.*, (2015), Amalia & Purbadharmaja (2014) menunjukkan bahwa KKD berpengaruh terhadap IPM. Berdasar penjelasan tersebut maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu tolok ukur perbaikan kualitas Pendidikan karena pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMK yang sejatinya disiapkan untuk langsung bekerja namun tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada. Semakin baik penilaian kinerja keuangan suatu daerah menandakan baiknya kinerja pemerintahan daerah sebagai *agent*. Jika kinerja *agent* semakin baik, maka pemerintahan daerah akan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat sebagai *principal* yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah serta dapat mengurangi pengangguran. Penelitian sebelumnya Nurulita *et al.*, (2018), Ani & Dwirandra (2014) menunjukkan bahwa KKD tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H3:** Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka rasio kinerja keuangan daerah berbeda di setiap provinsi, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan antardaerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Indeks gini menggambarkan ketimpangan pendapatan antardaerah, semakin kecil nilai koefisien gini maka pendapatan masyarakat semakin merata. Kinerja pemerintah daerah yang baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini menurun. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H4:** Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Gini

PE menunjukkan peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan kenaikan alokasi belanja untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih sehat, dan lebih berpendidikan yang termasuk dalam indikator IPM. Penelitian Maulana & Bowo (2013), Adelfina & Jember (2016), dan Bhakti, Istiqomah, & Suprpto (2014) menunjukkan PE memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H5:** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

TPT di suatu negara dipengaruhi oleh PE. Ketika pertumbuhan ekonomi disuatu negara mengalami kenaikan maka proses produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa juga mengalami kenaikan yang akan menyerap banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan barang sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan Zulhanafi, Aimon, & Syofyan (2013), Anggoro & Soesatyo (2015), Muslim (2014), Amin (2016), dan Noviatamara *et al.*, (2019) menemukan bahwa PE memiliki pengaruh negatif terhadap TPT di suatu wilayah. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H6:** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu permasalahan ekonomi yang terjadi di negara berkembang adalah ketimpangan pendapatan. Indeks gini digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan pendapatan di suatu wilayah atau negara. PE yang mengalami peningkatan akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi dan indeks gini diharapkan akan mengalami penurunan. Penelitian yang dilakukan Panca Kurniasih (2015), Arka & Yasa (2015), dan Agussalim (2016) memperoleh hasil PE berpengaruh negatif terhadap IG. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H7:** Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indeks Gini

Menurut teori agensi akan ada benturan kepentingan antara *principal* dan *agent*. BPK adalah pihak

yang berwenang untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh Pemda, sehingga masyarakat yakin akan kebenaran dari laporan yang ada. Pelaporan keuangan ini dilakukan agar masyarakat (*principal*) bisa melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan cara memantau dan mengevaluasi hasil kerja pemerintahan daerah (*agent*) apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya. Pengevaluasian hasil kerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui analisis kinerja keuangan daerah oleh para pemakai laporan keuangan termasuk masyarakat. Auditor memberikan pernyataan professional mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pernyataan yang diberikan auditor menjadi indicator dalam menilai kualitas LKPD. Opini tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat terhadap laporan LKPD yang dipublikasikan. Opini WTP didapatkan dari KKD yang baik dan merupakan gambaran dari tertibnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemda. Menurut penelitian yang dilakukan Ani & Dwirandra (2014), Putry & Badrudin (2017), dan Syamsudin *et al.*, (2015) memperoleh hasil bahwa KKD yang terdiri dari: RKM berpengaruh positif secara signifikan terhadap PE, sedangkan REFEEK, REFI, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Berdasar penjelasan tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H8:** Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memoderasi hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

IPM merupakan tolok ukur pembangunan suatu negara yang paling tepat karena memperhitungkan angka harapan hidup dan angka harapan lama sekolah. Evaluasi atas kinerja keuangan di antaranya dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran dan kemudian membandingkannya dengan data APBD melalui analisis rasio yang akan menggambarkan bagaimana pemda mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik penilaian kinerja keuangan suatu daerah menandakan baiknya kinerja pemerintahan daerah sebagai *agent*. Jika kinerja *agent* semakin baik, maka pemerintahan daerah akan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat sebagai *principal* yang diharapkan dapat menjadikan PE yang inklusif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian sebelumnya Harliyani & Haryadi (2016), Suryaningsih *et al.*, (2015), Amalia & Pur-

badharmaja (2014) menunjukkan bahwa KKD berpengaruh terhadap IPM. Penelitian sebelumnya Arsa & Setiawina, (2015), Nurulita *et al.*, (2018), Syamsudin *et al.*, (2015), dan Ani & Dwirandra, (2014) menunjukkan bahwa rasio KKD yang berupa RKM, REFEEK, dan REFI berpengaruh positif signifikan terhadap PE. Berdasar penjelasan tersebut maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H9:** Pertumbuhan Ekonomi (PE) memediasi hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah (KKD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu tolok ukur perbaikan kualitas Pendidikan karena pengangguran terbanyak berasal dari lulusan SMK yang sejatinya disiapkan untuk langsung bekerja namun tidak terserap oleh lapangan kerja yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, karena ketika pertumbuhan ekonomi disuatu negara mengalami kenaikan maka proses produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa juga mengalami kenaikan yang akan menyerap banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan barang sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki sumber PAD yang berbeda hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Semakin baik penilaian kinerja keuangan suatu daerah menandakan baiknya kinerja pemerintahan daerah sebagai *agent*. Jika kinerja *agent* semakin baik, maka pemerintahan daerah akan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat sebagai *principal* yang diharapkan dapat menjadikan PE yang inklusif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran. Penelitian Nurulita *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara REFEEK terhadap TPT melalui PE. Berdasar penjelasan tersebut maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

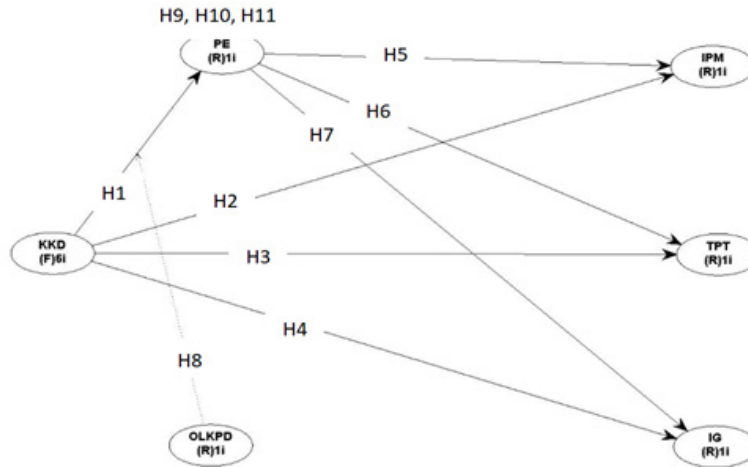
**H10:** Pertumbuhan Ekonomi (PE) memediasi hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah (KKD) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

IG menggambarkan ketimpangan pendapatan antardaerah, semakin kecil nilai koefisien gini maka pendapatan masyarakat semakin merata. Pengevaluasian hasil kerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui analisis kinerja keuangan daerah oleh para

pemakai laporan keuangan termasuk masyarakat. Auditor memberikan pernyataan professional mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jika kinerja *agent* semakin baik, maka pemerintahan daerah akan semakin baik pula layanan publik kepada masyarakat sebagai *principal* yang diharapkan dapat menjadikan PE yang inklusif serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Berdasar penjelasan tersebut maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

**H11:** Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan antara Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Gini



**Gambar 1**  
Model Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia selama periode pengamatan 2016-2018 dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh 102 sampel data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model dari Warp-PLS.

**HASIL PENELITIAN**

*Model fit indices* menunjukkan kualitas dan kesesuaian model dengan data yang diteliti. ARS digunakan untuk menilai besarnya variabel eksogen, endogen tergantung, dan mediasi (<0,05). Untuk melihat keterkaitan hubungan antarvariabel menggunakan APC (<0,05). AVIF digunakan untuk melihat besarnya korelasi antarvariabel (AVIF < 5). Dalam penelitian indikator fit model sudah memenuhi kriteria *goodness of fit* model sehingga model penelitian dapat digunakan untuk

melakukan uji hipotesis.

**Tabel 1**  
Hasil Inner Model (R-square)

Variabel	R-Square
KKD	-
OLKPD	-
PE	0.02
IPM	0.38
TPT	0.18
IG	0.22

Uji hipotesis dilakukan dengan cara menguji hubungan antarvariabel. Hipotesis diterima apabila uji statistik yang dilakukan memperoleh hasil p-value kurang dari alpha. Hasil hipotesis ditunjukkan pada Tabel 3 dan Gambar 2.

**Tabel 2**  
*Goodness of Fit Model*

Hasil	P-value	Kriteria	Keterangan
APC=0,275	P<0,001	IF P < 0,05	Diterima
ARS=0,201	P<0,009	IF P < 0,05	Diterima
AVIF=1,052		P < 5	Diterima

**Tabel 3**  
*Hasil Pengujian Hipotesis*

Hubuungan Variabel	Koefisien Jalur	P-value	Prediksi	Temuan	Hipotesis
KKD → PE	0,13	0,08*	+	+	Diterima
KKD → IPM	0,51	<0,01**	+	+	Diterima
KKD → TPT	0,30	<0,01**	-	+	Ditolak
KKD → IG	0,23	<0,01**	-	+	Ditolak
PE → IPM	-0,15	0,06*	+	-	Ditolak
PE → TPT	-0,36	<0,01**	-	-	Diterima
PE → IG	0,38	<0,01**	-	+	Ditolak
OLKPD*KKD→ PE	0,05	0,32			Ditolak
KKD→ PE→ IPM	0,012	0,390			Ditolak
KKD→ PE→ TPT	0,01	0,247			Ditolak
KKD→ PE→ IG	0,014	0,233			Ditolak

Ket: \*: sig <0,10  
\*\* sig <0,05

**PEMBAHASAN**

Pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui apakah KKD berpengaruh positif terhadap PE. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur bertanda positif sebesar 0,13 dan signifikansi 0,08 menunjukkan bahwa semakin baik KKD yang dihasilkan maka PE juga akan meningkat. Berdasar hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terbukti. Hasil pengujian hipotesis 2 pada Tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien jalur +0,61 dengan signifiikansi <0,01 menunjukkan bawa semakin baik KKD maka akan membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan koefisien jalur +0,30 dengan signifiikansi <0,01 menunjukkan bahwa semakin baik KKD maka belum

tentu mengakibatkan penurunan pengangguran karena besar pengangguran setiap daerah berbeda. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 tidak terbukti. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa koefisien jalur +0,23 dengan signifiikansi <0,01 menunjukkan bahwa semakin baik KKD maka belum tentu dapat mengurangi ketimpangan antardaerah. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 5 memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,15 (bertanda negatif) menunjukkan semakin meningkat PE, maka IPM semakin menurun dan nilai signifiikansi <0,01 artinya ketika menyusun rencana untuk pembangunan ekonomi selalu menentukan berapa presentase yang harus tercapai dalam PE agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 tidak terbukti. Hasil pengujian sesuai dengan hipotesis 6, yang



dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,36 dan probabilitas  $<0,01$ , artinya adanya peningkatan permintaan barang atau jasa dari masyarakat, maka diperlukan banyak tenaga kerja untuk dapat memenuhi permintaan tersebut, sehingga tingkat pengangguran mengalami penurunan. Pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 6 terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 7 menunjukkan bahwa PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IG yang dibuktikan dengan uji hipotesis secara keseluruhan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,38 dan signifikansi  $<0,01$ . Hal ini mengindikasikan semakin tinggi PE semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 7 tidak terbukti. Hasil pengujian hipotesis 8 menunjukkan bahwa koefisien jalur +0,05 dengan signifikansi 0,32 menunjukkan bahwa OLKPD memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan dan tidak mampu memperkuat pengaruh antara KKD terhadap PE. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 8 tidak terbukti.

Hasil pengujian hipotesis 9 menunjukkan koefisien jalur +0,012 dengan signifikansi 0,39 menunjukkan bahwa PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak mampu memediasi hubungan KKD terhadap IPM. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 9 tidak terbukti. Hipotesis 10, PE memediasi hubungan KKD terhadap TPT. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien jalur +0,012 dengan signifikansi 0,247 menunjukkan bahwa PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak mampu memediasi hubungan KKD terhadap TPT. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 10 tidak terbukti. Hipotesis 11, PE memediasi hubungan KKD terhadap IG. Hasil pengujian hipotesis 11 menunjukkan bahwa koefisien jalur +0,012 dengan signifikansi 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak mampu memediasi hubungan KKD terhadap IG. Hasil pengujian menunjukkan hipotesis 11 tidak terbukti.

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

KKD ditentukan dari RDF, RKM, REFEK, REFI dan RKBL. Pemda harus merencanakan dan mengelola kegiatan serta menyediakan sarana dan prasarana dalam meningkatkan PE. Rasio keserasian belanja langsung termasuk salah satu rasio yang menjadi perhatian

publik, karena masyarakat ingin mengetahui apakah pajak yang mereka dibayarkan sudah dialokasikan secara tepat atau tidak. Semakin banyak anggaran yang diberikan dalam belanja langsung, maka pemda semakin giat dalam membangun fasilitas dan infrastruktur yang menunjang keberhasilan PE. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan KKD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PE. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat KKD di tiap daerah maka akan meningkatkan PE. Penelitian ini sejalan dengan Arsa & Setiawina, (2015), (Nurulita *et al.*, 2018), Syamsudin (2015), (Ani & Dwirandra, 2014) menunjukkan bahwa rasio KKD yang berupa RKM, REFEK, dan REFI berpengaruh positif signifikan terhadap PE.

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

KKD merupakan salah gambaran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerahnya. IPM merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena dilihat melalui angka kelahiran, pendidikan, dan pendapatan. KKD yang meningkat akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat karena salah satu komponen dalam KKD adalah rasio keserasian belanja langsung yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan publik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa KKD berpengaruh positif terhadap IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Harliyani & Haryadi, 2016), (Suryaning-sih *et al.*, 2015), (Amalia & Purbadharmaja, 2014) menunjukkan bahwa KKD berpengaruh terhadap IPM.

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor pendukung dari kinerja keuangan daerah karena SDM adalah pelaksana dari seluruh kegiatan pemerintah daerah. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi makro jangka Panjang. Dengan SDM yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga dapat mengurangi pengangguran karena ada dana yang dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana publik yang tentu saja hal tersebut membuka lapangan kerja yang

baru. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa probabilitas KKD berpengaruh positif signifikan terhadap TPT. Hal tersebut memandakan bahwa KKD yang baik belum tentu mengurangi tingkat pengangguran karena masih ada ketimpangan nilai KKD dan TPT antardaerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nurulita *et al.*, 2018), (Ani & Dwirandra, 2014) yang menunjukkan bahwa KKD tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT.

#### **Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Gini**

Angka rasio KKD masing masing daerah berbeda, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan antardaerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Indeks gini menggambarkan ketimpangan pendapatan antardaerah, semakin kecil nilai koefisien gini maka pendapatan masyarakat semakin merata. Kinerja pemerintah daerah yang baik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini menurun. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa KKD berpengaruh positif signifikan terhadap IG. Hal tersebut menunjukkan KKD yang baik belum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada melainkan justru menambah ketimpangan pendapatan.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

PE merupakan proses terjadinya peningkatan pendapatan nasional riil. IPM adalah indikator untuk mengukur kualitas hidup penduduk yang dilihat melalui angka kelahiran, pendidikan, dan pendapatan. PE yang mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh masyarakat agar dapat dialokasikan sebagian ke sektor kesehatan dan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pengujian hipotesis menunjukkan PE berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini menunjukkan PE masih bersifat eksklusif sehingga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sesuai dengan harapan. Meskipun pendapatan yang diterima belum optimal, IPM menunjukkan progres yang cukup baik di setiap daerah.

Penelitian ini sejalan dengan (Badrudin, 2012) dan Syariyah (2016) yang menunjukkan hasil PE ber-

pengaruh negatif terhadap IPM. Sedangkan penelitian Adelfina dan Jember (2016), dan Bhakti *et al.* (2018) menunjukkan PE memiliki pengaruh positif terhadap IPM.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Setiap tahun, negara akan mengalami peningkatan produktivitas baik dari segi kualitas maupun jumlah produksi. SDM merupakan salah satu faktor pendukung proses produktivitas. PE dan PT merupakan masalah ekonomi makro jangka panjang. Untuk melihat perkembangan ekonomi yang bergerak cepat atau lambat dapat dilihat dari tingkat pengangguran suatu wilayah. Pengangguran terjadi karena tidak seimbang nya kesempatan kerja dengan pencari kerja, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja kecil.

Pengujian hipotesis menunjukkan hasil probabilitas PE bernilai negatif dan signifikan terhadap PT. Meningkatnya PE ditandai dengan adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan berpengaruh terhadap kenaikan produktivitas. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang sehingga jumlah dan harga barang yang ada di masyarakat tetap stabil. Peningkatan produktivitas ini akan mengurangi jumlah pengangguran. Penelitian ini sejalan dengan Zulhanafi *et al.* (2013), Anggoro (2015), Muslim (2014), dan Amin (2016).

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Gini**

Pembangunan yang dilakukan tidak merata menimbulkan ketimpangan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat akibatnya terjadi kesenjangan sosial antar daerah di Indonesia. SDA yang berlimpah harusnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat jika pemerintah memiliki regulasi yang berpihak pada rakyat. PE yang meningkat diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar daerah di Indonesia. Pengujian hipotesis menunjukkan PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IG. Mengindikasikan PE yang meningkat tidak diikuti dengan peningkatan PE di daerah lain yang menyebabkan ketimpangan semakin tinggi, hal ini terjadi karena pelaku ekonomi lebih memfokuskan untuk berinvestasi di daerah-daerah maju yang memiliki infrastruktur lengkap,



tenaga kerja yang terampil serta tersedianya peluang bisnis. Sehingga daerah-daerah yang tertinggal semakin sulit untuk maju karena daerah tersebut memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur, tenaga kerja terlatih dan terdidik yang tidak tersedia. Ketimpangan akan semakin lebar, jika pembangunan fasilitas dan infrastruktur tidak dilakukan. Penelitian sejalan dengan Arifianto (2013), Akhmedjonov *et al.* (2013), dan Agusalm (2016) yang menunjukkan PE memiliki pengaruh positif terhadap IG. Penelitian tidak sejalan dengan yang dilakukan Panca Kurniasih (2015) dan Wirawan dan Arka (2015) yang menunjukkan bahwa PE berpengaruh negatif terhadap IG.

**Pengaruh Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap hubungan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Bentuk pertanggungjawaban pemda dalam mengelola APBD dinyatakan dalam bentuk LRA yang diaudit oleh BPK. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan (LK). Semakin baik opini yang diberikan oleh BPK menunjukkan pengelolaan APBD oleh pemda sudah dilaksanakan dengan baik. Pengujian hipotesis menunjukkan OLKPD memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan KKD dan PE, yang berarti OLKPD memiliki hubungan yang memperkuat pengaruh antara KKD pada PE. Hal tersebut menunjukkan bahwa KKD sudah baik dan mendapatkan opini audit yang WTP tetapi belum mampu meningkatkan PE.

**Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

KKD merupakan salah gambaran pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerahnya. IPM merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat karena dilihat melalui angka kelahiran, pendidikan, dan pendapatan. Pemda harus merencanakan dan mengelola kegiatan serta menyediakan sarana dan prasana dalam meningkatkan PE. Pengujian hipotesis menunjukkan PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan KKD dengan IPM yang berarti jika KKD meningkat akan mengakibatkan kenaikan PE tetapi belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih

banyak ketimpangan yang terjadi di daerah

**Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Nilai rasio KKD pada setiap daerah berbeda karena pendapatan yang diperoleh tiap daerah juga berbeda. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil jangka Panjang. Untuk melihat perkembangan ekonomi yang bergerak cepat atau lambat dapat dilihat dari tingkat pengangguran suatu wilayah. Pengangguran terjadi karena tidak seimbangnya kesempatan kerja dengan pencari kerja, sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja kecil. Pengujian hipotesis menunjukkan PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan KKD dengan TPT yang berarti jika KKD meningkat akan mengakibatkan kenaikan PE tetapi tidak menurunkan pengangguran.

**Pertumbuhan Ekonomi memediasi hubungan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Gini**

KKD mencerminkan pencapaian kinerja tiap daerah yang berbeda. PE merupakan salah satu masalah ekonomi makro jangka panjang. Untuk melihat perkembangan PE salah satunya dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan antarmasyarakat. Ketimpangan pendapatan terjadi karena pendapatan penduduk antar wilayah berbeda, tentu saja hal tersebut menjadikan salah satu faktor kecemburuan sosial. Pengujian hipotesis menunjukkan PE memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap hubungan KKD dengan IG yang berarti jika KKD meningkat akan mengakibatkan kenaikan PE tetapi tidak menurunkan ketimpangan pendapatan.

**Analisis Tambahan**

Peneliti melakukan analisis tambahan dengan menguji data tanpa ngikutsertakan Provinsi DKI Jakarta karena provinsi tersebut merupakan ibukota negara dan memiliki rasio-rasio kinerja, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka yang nilainya sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Setelah dilakukan pengujian menggunakan WarpPLS 6.0. Hasil pengujian peneliti disajikan dalam Tabel 4 dan Gambar 2.

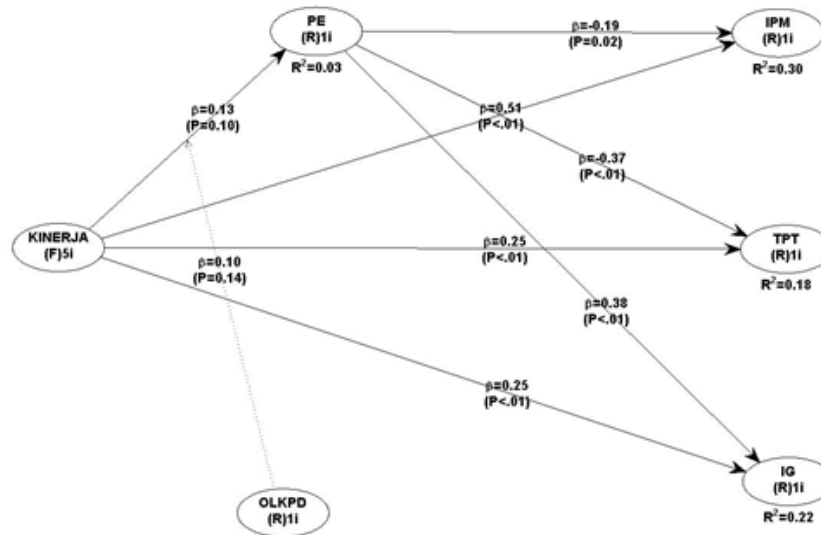
**Tabel 4**  
**Hasil Pengujian tanpa Provinsi DKI Jakarta**

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	P-value	Prediksi	Temuan	Kesimpulan
KKD → PE	0,13	0,10*	+	+	Diterima
KKD → IPM	0,51	<0,01**	+	+	Diterima
KKD → TPT	0,25	<0,01**	-	+	Ditolak
KKD → IG	0,25	<0,01**	-	+	Ditolak
PE → IPM	-0,19	0,02**	+	-	Ditolak
PE → TPT	-0,37	<0,01**	-	-	Diterima
PE → IG	0,38	<0,01**	-	+	Ditolak
OLKPD*KKD → PE	0,05	0,32			Ditolak
KKD → PE → IPM	-0,024	0,367			Ditolak
KKD → PE → TPT	-0,047	0,254			Ditolak
KKD → PE → IG	0,047	0,252			Ditolak

Ket: \*: sig <0,10  
 \*\*: sig <0,05

Berdasar hasil pengujian pada Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan indeks pembangunan manusia. Pertum-

buhan ekonomi belum dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan namun dapat mengurangi tingkat pengangguran.



**Gambar 2**  
**Hasil Pengujian tanpa Provinsi DKI Jakarta**

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasar pembahasan diatas mengenai hubungan KKD terhadap IPM, TPT, dan IG dengan PE sebagai intervening dan OLKPD sebagai moderating, maka dapat disimpulkan 1) KKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE. Semakin baik KKD yang dihasilkan setiap provinsi maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.; 2) KKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. KKD yang dicapai setiap provinsi semakin baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di ukur menggunakan IPM; 3) KKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT. Kenaikan kinerja keuangan tidak membuat pengangguran menurun karena kinerja yang baik belum tentu dapat meningkatkan lapangan kerja yang tersedia sehingga tidak mampu menampung angkatan kerja yang ada; 4) KKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IG. KKD yang dihasilkan tiap Provisnsi di Indonesia berbeda-beda, olah karena itu masih ada ketimpangan pendapatan antar daerah yang hal tersebut dapat menyebabkan kecemburuan social; 5) PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Meskipun PE belum optimal karena ada perbedaan yang cukup signifikan antar daerah, tetapi IPM menunjukkan progress yang cukup baik di setiap daerah; 6) PE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Peningkatan produktivitas menyebabkan permintaan jumlah tenaga kerja meningkat sehingga pengangguran menjadi menurun; 7) PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap IG. Pelaku ekonomi lebih memfokuskan untuk berinvestasi di daerah-daerah maju yang memiliki infrastruktur lengkap. Akibatnya Ketimpangan akan semakin lebar, jika pembangunan fasilitas dan infrastruktur tidak dilakukan secara merata; 8) OLKPD tidak memoderasi hubungan KKD terhadap PE. Hal ini menunjukkan bahwa KKD yang baik akan menghasilkan opini audit yang WTP tetapi belum mampu meningkatkan PE; 8) PE tidak memediasi hubungan antara KKD terhadap IPM. Hal ini menunjukkan PE di setiap provinsi berbeda karena angka KKD juga berbeda sehingga IPM belum merata walaupun memiliki *progress* yang meningkat dari tahun ke tahun, 9) PE tidak memediasi hubungan antara KKD terhadap TPT. Hal ini menunjukkan kinerja antar daerah berbeda sehingga pelaku ekonomi

lebih memfokuskan untuk berinvestasi di daerah yang memiliki infrastruktur lengkap. Sehingga tingkat pengangguran di daerah yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur lebih rendah daripada daerah yang tidak sedang melakukan pembangunan; 10) PE tidak memediasi hubungan antara KKD terhadap IG. Hal ini menunjukkan kinerja antar daerah berbeda sehingga pelaku ekonomi lebih memfokuskan untuk berinvestasi di daerah yang memiliki infrastruktur lengkap. Akibatnya Ketimpangan akan semakin lebar, jika pembangunan fasilitas dan infrastruktur tidak dilakukan secara merata. Penelitian tidak mengambil populasi pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan data indeks gini untuk pemerintah kabupaten dan kota tidak tersedia di web bps.go.id. penelitian tidak menggunakan data terkini yaitu tahun 2019, karena Laporan Realisasi Anggaran belum dipublikasikan di situs DJPK dan opini audit belum di publikasikan oleh BPK.

### Saran

Berdasar simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini maka saran yang disampaikan; 1) Bagi Pemerintah Daerah, berdasar hasil perhitungan KKD dan hasil opini audit yang diterima, pemerintah daerah perlu memmperhatikan pengelolaan keuangan daerah agar alokasinya lebih banyak untuk pelayanan publik sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) Bagi Penelitian Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya disarankan mengukur kinerja keuangan daerah menggunakan beberapa rasio lainnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan model penelitian dengan menambahkan beberapa variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelfina, & Jember, I. M. 2016. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten kota provinsi bali periode 2005 – 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(10), 1011–1025.

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. 2014. Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap indeks pembangunan manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3, 257–264.
- Amin, M. B. 2016. *Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2005-2013*.
- Anggoro, M. H., & Soesatyo, Y. 2015. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3 Nomor 3, 1–13. Retrieved from <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/12553/16292>
- Ani, N. L. N. P., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan kabupaten dan kota. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(3), 481–497.
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. 2015. Pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali tahun 2006 s.d. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, & Suprpto. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452–469. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Fadli, F. 2017. Adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. *jurnal ilmu ekonomi dan pembangunan*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312>
- Harliyani, E., & Haryadi, H. 2016. Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 129–140.
- Maulana, R., & Bowo, P. A. 2013. Pengaruh modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Muslim, M. R. 2014. Konsep pembelajaran ekonomi berbasis ekonomi kreatif. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2), 171–181. <https://doi.org/10.31538/iijse.v1i1.68>
- Noviatamara, A., Ardina, T., & Amalia, N. 2019. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1341>
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. 2018. Analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di provinsi Riau. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i3.3350>
- Putry, N. A. C., & Badrudin, R. 2017. *Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap opini audit dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta*. 12(JRMB), 25–34. <https://doi.org/10.1109/36.135827>
- Suryaningsih, N. N., Utama, M. S., & Yasa, I. N. M. 2015. Dampak kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 08, 537–554.
- Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. N. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 17(1), 15–27.
- Zulhanafi, Aimon, H., & Syofyan, E. 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2(03), 85–109.